

PANCASILA SEBAGAI *THE LIVING VALUES* DALAM PENGALAMAN SEJARAH KEBANGSAAN INDONESIA

Nur Fatah Abidin

Staff Pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret

Email: nurfatah@staff.uns.ac.id

Abstrak

Tulisan ini berupaya mendiskusikan kedudukan Pancasila sebagai the living value dengan fokus perbincangan Pancasila dalam konteks pengalaman sejarah kebangsaan Indonesia. Dasar dari tulisan ini adalah notulen pidato Soekarno dalam sidang BPUPK sebagai titik penting untuk memahami Pancasila dalam tiga konsepsi yang kami ajukan: living value, common denominator, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Secara historis, Pancasila tidak hanya Leitstar dan Philosophische Grondslag. Lebih dari itu, Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, musyawarah, dan keadilan yang dihidupkan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Refleksi dari pengalaman historis tersebut menempatkan Pancasila sebagai simpul pemersatu dan bukan sebagai terminology/konsep yang diperdebatkan. Persatuan ini bersumber dan sekaligus diikat dalam kesalingpengertian dan kesepahaman dalam perbedaan dan persamaan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, ikatan ini lebih bersifat emosional untuk mencapai tujuan bermasyarakat dan bernegara secara bersama-sama. Penempatan Pancasila sebagai living value dan common denominator setidaknya menjadi alternative pendekatan disamping konsep 'Ideologi' sebagai pemersatu bangsa.

Kata kunci: Pancasila, living values, common denominator, pengalaman sejarah kolektif

PENDAHULUAN

Kajian Pancasila dalam kurun waktu tujuh dekade sejak kemerdekaan Indonesia pada umumnya berkisar pada aspek ideologi (Wahyudi, 2006), filsafat (Poespowardojo, 1989; Suwarno, 1993), falsafah (Notonagoro, 1988), dasar negara (Widiususeno, 2011), dan kajian terhadap aplikasinya dalam berbagai kehidupan seperti tata negara (Wahyudi, 2012), politik (Liddle, 1982), hukum (Asshiddiqie, 2011), ekonomi (McCawley, 1982), dan sosio-kultural (Arif, 2016). Kajian-kajian tersebut memandang Pancasila dari perspektif elitis yang menempatkan masyarakat sebagai obyek yang harus memahami Pancasila sesuai dengan artikulasi negara. Memang, tidak ada yang

salah dalam kerangka ini karena Pancasila adalah dasar negara dan oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Namun demikian, dalam kerangka ini, setidaknya Pancasila memiliki dua resiko ketika berdinamika dalam ruang politik dan sosial.

Pertama, dalam bentang sejarah Indonesia, Pancasila tidak hanya ditempatkan sebagai ideologi dan landasan negara melainkan juga sebagai alat legitimasi kekuasaan pemerintah (Song, 2008). Kajian kritis terhadap kondisi ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang mengupas bagaimana kedudukan Pancasila pada masa kekuasaan Soekarno (Purdi, 1982) dan Orde Baru (Morfit, 1981; Ward, 2010; Iskandar, 2016). *Kedua*, sebagai akibat dari pandangan elitis, masyarakat hanya ditempatkan sebagai obyek yang pasif dalam kerangka penguatan Pancasila. Pasifikasi masyarakat meniadakan partisipasi dari arus bawah dalam penguatan Pancasila dan koreksi implementasi Pancasila pada tingkatan pemerintah, birokrasi, dan kekuasaan.

Apabila dipandang dari perspektif historis, Pancasila sebenarnya mewujud tidak hanya sebagai ideologi, dasar negara, dan bintang penunjuk yang semata-mata dimiliki oleh negara. Pancasila juga mewujud dalam nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat atau *the living values*. Namun, Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia belum banyak, untuk tidak mengatakan tidak pernah, dikaji oleh kalangan peneliti. Tantangan terbesar dari upaya penelusuran Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari terletak pada masalah ontologis dan epistemologis yang menyertainya,.

Konsep Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia belum memiliki landasan empiris dan analitis yang kuat untuk dapat diperdebatkan dan dipromosikan sebagai suatu arus alternatif dalam kajian Pancasila. Dapat dikatakan, konsep ini bersifat abstrak, sulit untuk diartikulasikan secara sistematis dan memiliki landasan empiris yang kuat. Padahal, kajian mengenai Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari menjadi bagian penting dalam penguatan atau koreksi terhadap penyalahgunaan Pancasila.

Berdasarkan permasalahan dan gagasan tersebut, tulisan ini mencoba menelusuri kedudukan Pancasila dalam bentang sejarah nasional Indonesia. Tulisan ini berupaya mendiskusikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam konteks pengalaman sejarah kebangsaan Indonesia. Dasar dari tulisan ini adalah notulen pidato Soekarno

dalam sidang BPUPK sebagai titik penting untuk memahami Pancasila dalam tiga konsepsi yang kami ajukan: living value, common denominator, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Secara historis, Pancasila tidak hanya Leitstar dan Philosophische Grondslag. Lebih dari itu, Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, musyawarah, dan keadilan yang dihidupkan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Refleksi dari pengalaman historis tersebut menempatkan Pancasila sebagai simpul pemersatu dan bukan sebagai terminology/konsep yang diperdebatkan. Persatuan ini bersumber dan sekaligus diikat dalam kesalingpengertian dan kesepahaman dalam perbedaan dan persamaan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *Discourse Historical Approach* (Reisigl dan Wodak, 2009). Sumber data penelitian adalah notulensi Pidato Soekarno dalam Sidang BPUPK yang dinotulensi oleh A.G. Pringgodigdo. Meskipun terdapat beberapa versi tentang kelahiran Pancasila, setidaknya momentum pidato Soekarno adalah titik paling awal dari kelahiran terminologi Pancasila dalam dinamika politik Indonesia. DHA terdiri dari analisis terhadap beberapa strategi diskursif yaitu meliputi analisis *nomination* atau konstruksi diskursi mengenai aktor sosial, obyek, fenomena, peristiwa, dan aksi, *predication* atau kualifikasi diskursif mengenai aktor sosial, peristiwa, dan fenomena sosial, *argumentation* atau justifikasi klaim dan kebenaran normatif, *perceptivization* atau pemosisian diri dalam sudut pandang terhadap subyek atau obyek tertentu, dan *mitigation* atau modifikasi terhadap suatu representasi dalam teks. Analisis tersebut difokuskan pada analisis dipusatkan pada strategi diskursif Soekarno dalam sidang BPUPK dan representasi nilai kehidupan sehari-hari dalam pidato Soekarno tersebut. Analisis tersebut ditujukan untuk mengungkap keberadaan dimensi nilai-nilai kehidupan sehari-hari masyarakat nusantara dalam Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konteks Pidato Soekarno dan Pancasila dalam Sidang BPUPK

Pancasila lahir dari konsensus agung *founding fathers* Indonesia dalam Sidang *Dokuritsu Junbi Chosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

(BPUPK) tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Soekarno yang berpidato tanggal 1 Juni 1945, mempromosikan Pancasila sebagai jawaban terhadap tujuan sidang tersebut yaitu merumuskan dasar-dasar Negara yang akan terbentuk kelak di kemudian hari. Notulen stenografis A.K. Pringgodigo menunjukkan suatu momen antusiasme yang bergemuruh di Gedung Chuo Sangi In ketika Soekarno membaca pidato. Apa yang tersirat dari antusiasme anggota sidang bukan hanya disebabkan kepiawaian pidato Soekarno. Dalam interpretasi sosio-psikologis, antusiasme tersebut menunjukkan adanya kesepakatan substansial terhadap konsepsi Pancasila yang dipaparkan Soekarno. Artinya, di satu sisi para anggota sidang terpicat dengan Soekarno sebagai figur kharismatik dan pada sisi lain para anggota sidang sepakat dengan nilai-nilai yang dipaparkan Soekarno. Yudi Latif (2012) dan (2014) telah melacak genealogi Pancasila dalam perspektif historis. Secara spesifik, Yudi Latif telah melacak akar pemikiran Pancasila mulai dari ketuhanan yang berkebudayaan, kemanusiaan universal, persatuan dalam kebhinnekaan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan sosial dengan dinamika sejarah, pergulatan pemikiran, dan kontestasinya di nusantara pra negara-bangsa Indonesia. Dalam kata lain, Yudi Latif telah menunjukkan suatu jaringan epistemik kelokalan di nusantara yang menjadi landasan Pancasila.

Para anggota sidang BPUPK adalah agen-agen yang merefleksikan komunitas epistemic nusantara tersebut. Dalam perspektif sosio-antropologis, 67 anggota Sidang BPUPK terhimpun dari berbagai elemen dan entitas sosio-politik dan kultural yang hidup di masyarakat pra Negara-bangsa Indonesia. Anggota sidang BPUPK tersebut memiliki dimensi skemata kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terbentuk dari perjumpaannya dengan dimensi sosio-kultural di Nusantara. Pikiran dan pengetahuan mereka adalah artefak dari nilai-nilai kearifan yang mereka jumpai dalam pengalaman hidupnya yang kemudian mengendap dalam pemikiran mereka. Interseksi antara latar belakang historis, kultural, pengalaman personal, ideologi, afiliasi, dan pemikiran masa depan yang ada di setiap anggota BPUPK ini kemudian mencapai titik persetujuan (*common denominator*). Tercatat tiga peristiwa penting yang menandai titik persetujuan mereka yaitu: Manifesto Politik 1923 sebagai titik awal dari keinginan bersatu secara politis (Kartodirdjo, 2000), Sumpah Pemuda 1928, dan Sidang BPUPK 29 Mei – 1 Juni 1945 sebagai titik penting lahirnya Pancasila sebagai *common denominator*.

Analisis genealogis mengenai dimensi kultural dan historis dari Pancasila ini membuktikan jaringan dan sinergi antara Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal dalam momentum perumusan Pancasila. Pancasila berakar dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh masyarakat nusantara yang berdialektika dengan jiwa zaman dan berbagai ideologi yang eksis di nusantara jauh sebelum terbentuknya Negara-bangsa Indonesia. Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, atau hari ketiga dalam rangkaian Sidang BPUPK. Sebelum Soekarno, telah banyak tokoh nasional yang berpidato misalnya Mohammad Yamin, Soepomo, Mohammad Hatta, dan Ki Bagoes Hadikoesoema. Secara kontekstual pidato Soekarno tidak sekedar mengungkapkan pemikiran Soekarno terhadap landasan negara melainkan lebih kepada politik konsensus untuk mempertemukan kesamaan dalam perbedaan di dalam sidang BPUPK. Dalam pidatonya, Soekarno berulang kali mencoba mendialektikan pemikiran-pemikiran yang telah diungkapkan sebelumnya dalam sidang BPUPK. Misalnya dalam kasus kebangsaan Soekarno berupaya mendialektikan pemikirannya dengan Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Moenandar mengenai konsep kebangsaan.

Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan, - macam-macam - tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persatuan philosophische grondslag, mencari satu "Weltanschauung" yang kita semuanya setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hadjar setuju, yang saudara Sanoesi setuju, yang saudara Abikoesno setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju. Apakah itu? Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan Negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?

Berdasarkan teks tersebut, Soekarno berupaya melakukan consensus di tengah perdekaan pendapat para anggota sidang BPUPK. Pidato Soekarno dengan demikian menempatkan Pancasila sebagai *common denominator* dari berbagai pendapat yang berkembang selama sidang BPUPK mengenai dasar negara merdeka. Dengan demikian, dalam konteks sidang BPUPK 1945, Pancasila adalah proses pencarian kesamaan dalam perbedaan mengenai dasar negara yang merdeka. Konsensus yang disepakati tersebut tidak sekedar pada euforia visi pencapaian kemerdekaan tetapi juga dilandasi pada kesamaan dasar Pancasila yaitu nilai-nilai masyarakat nusantara.

B. Representasi nilai-nilai masyarakat Nusantara dalam Pidato Soekarno

Dalam memenuhi tuntutan ketua Sidang BPUPK, Radjiman Wediodiningrat, alih-alih menggunakan terminology *philosophische grondslag*, Soekarno malah mengungkapkan gagasannya mengenai “*Weltanschauung*” sebagai suatu dasar negara merdeka yang kemudian dirumuskannya dalam istilah Pancasila. Rumusan *Weltanschauung* dianggap Soekarno sebagai landasan dari pendirian negara merdeka dengan memberikan contoh pada kasus Jerman, Uni Soviet, Jepang, dan Arab Saudi. Dalam kedudukan *Weltanschauung* sebagai dasar negara merdeka, Soekarno mengungkapkan:

“Paduka tuan Ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta philosophische grondslag, atau, jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu "Weltanschauung", di atas mana kita mendirikan Negara Indonesia itu.”

Sumber *Weltanschauung* yang diungkapkan oleh Soekarno tersebut ditelusur dari dalam pribadi manusia Indonesia. Soekarno meyakini bahwa “*Weltanschauung* ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita sebelum Indonesia merdeka dating”. Keberadaan sumber *Weltanschauung* dari dalam diri suatu bangsa diperkuat dari retorika Soekarno yang menyatakan bahwa *Weltanschauung* dari negara bangsa yang sudah ada sebelumnya seperti Uni Soviet yang telah disusun sejak tahun 1895 sebelum Revolusi Bolsevik 1905, Hitler yang telah merumuskan *Weltanschauung* sejak 1921-an, dan Sun Yat sen yang telah merumuskan *Weltanschauung* sejak tahun 1885.

Dengan demikian, menurut Soekarno, *Weltanschauung* bersumber dari dalam diri manusia Indonesia yang sudah lama mengendap dalam kognisi manusia tersebut dan tidak dapat dipisahkan dari dialektikanya dengan lokus kelokalan tempat dirinya hidup. Soekarno kemudian menekankan bagaimana kesatuan antara “manusia” dan “tempatnyanya” yang meskipun berkonteks kebangsaan dapat menjadi representasi dari akar-akar *Weltanschauung* dari gagasan yang dikemukakannya:

“Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau tuan Moenandar, mengatakan tentang “Persatuan antara orang dan tempat”. Persatuan antara orang dan tempat tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya! Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya”

Dari teks tersebut tampak bahwa Soekarno telah menunjukkan perhatiannya terhadap dialektika antara manusia dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat nusantara yang membentuk kepribadian dan karakteristik manusia nusantara. Dialektika ini diwujudkan dalam bentuk pengalaman hidup di mana manusia Indonesia melalui pengalaman sehari-hari berdialektikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat nusantara. Soekarno menekankan dialektika ini dalam dua bagian teks pidato yang dikemukakan setelahnya:

“Pancasila menjadi Tri Sila, Tri Sila menjadi Eka Sila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih: Tri Sila, Eka Sila ataukah Panca Sila? Isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka yang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu. Tetapi jangan lupa, kita hidup di dalam masa peperangan, saudara-saudara.”

Pada teks diatas Soekarno menyebutkan bahwa Pancasila adalah dialektika dirinya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang telah lama dirasakannya di bumi Nusantara. Soekarno menyatakan bahwa “Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu” yang menunjukkan kesadarannya terhadap interaksi dengan manusia nusantara sepanjang pengalamannya yang membentuk

Weltanschauung Soekarno. Penekanan pada pengalaman dialektis ini direperkusikan Soekarno pada bagian akhir pidatonya:

“Berhubung dengan itu, sebagai yang diusulkan oleh beberapa pembicara-pembicara tadi, barangkali perlu diadakan noodmaatregel, peraturan yang bersifat sementara. Tetapi dasarnya, isinya Indonesia Merdeka yang kekal abadi menurut pendapat saya, haruslah Panca Sila. Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus Weltanschauung kita. Entah saudara-saudara mufakat atau tidak, tetapi saya berjuang sejak 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Weltanschauung itu. Untuk membentuk nasionalistis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia; untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam perikemanusiaan; untuk permufakatan; untuk sociale rechtvaardigheid; untuk ke-Tuhanan. Pancasila, itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Tetapi saudara-saudara, diterima atau tidak terserah kepada saudara-saudara. Tetapi saya sendiri mengerti seinsyaf-insyafnya, bahwa tidak ada satu Weltanschauung dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realiteit, jika tidak dengan perjuangan!”

Pada teks diatas, Soekarno semakin mengeksplisitkan bagaimana pengalaman pribadinya ketika bersentuhan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat nusantara dalam kaitannya dengan perumusan *Weltanschauung* Soekarno. Dalam teks tersebut, Soekarno menampilkan dirinya sebagai tipe ideal manusia nusantara yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang berkembang di tempat dirinya hidup. Dari dialektika dengan lingkungannya, Soekarno kemudian merumuskan Pancasila sebagai landasan dari negara yang merdeka.

Kedudukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Nusantara dalam konstruksi Pancasila ditekankan oleh Soekarno ketika dirinya secara retorik mereduksi Pancasila menjadi satu asas yaitu “gotong royong”. Soekarno mengungkapkan:

“Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat

Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia! - semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indo-nesia yang tulen, yaitu perkataan "gotong-royong". Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong ! Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong!"

Gotong royong dianggap sebagai “satu perkataan Indonesia yang tulen” yang merepresentasikan bagaimana landasan Pancasila tidak dapat dipisahkan dan sekaligus bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Nusantara pada saat itu.

Reperkusi Soekarno terhadap sumber-sumber konstruksi *Weltanschauung*-nya dan penekanannya terhadap kedudukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat nusantara telah merepresentasikan alur bagaimana sumber inspirasi Pancasila. Dari jaringan antar teks dalam pidato Soekarno pada sidang BPUPK 1 Juni 1945, tampak rumusan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Nusantara yang mana mewarnai pengalaman historis manusia Indonesia. Dengan demikian, momentum sidang BPUPK adalah pengangkatan dan penyepakatan nilai-nilai masyarakat nusantara sebagai landasan negara merdeka.

Pidato Soekarno secara tersirat menunjukkan dimensi nilai-nilai kearifan lokal yang berefleksi dalam Pancasila. Dengan demikian, genealogi Pancasila tidak hanya terhenti pada Soekarno. Pancasila memiliki menunjukkan akar-akar kultural yang begitu mendalam dalam masyarakat pra Negara-bangsa Indonesia (Nusantara).

Tiga wajah Pancasila yang mewujud dalam sidang BPUPK: (1) Pancasila sebagai *philosophische grondslag, weltanschauung, dan leitstar* bangsa Indonesia, (2) Pancasila sebagai *common denominator*, dan (3) Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Wajah Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan penting bagi konstruksi Pancasila semesta yang menyeluruh sebagai kesatuan yang harus saling melengkapi. Dengan demikian, konsep Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari memiliki landasan historis yang cukup kuat apabila dipandang dari konstruksi pidato Soekarno dalam sidang BPUPK 1945. Namun demikian, untuk memahami secara lebih luas, diperlukan analisis historis yang lebih Panjang melampaui masa kemerdekaan

untuk mengetahui tantangan dan apa yang harus dilakukan untuk memperkuat Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan masyarakat nusantara.

C. Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia

Sejak disahkan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila secara sah telah diangkat menjadi landasan negara. Hal ini membawa suatu konsekuensi struktural bahwa seluruh rumusan kenegaraan harus dilandaskan atas sila-sila dalam Pancasila. Negara Indonesia kemudian direncanakan dibangun secara ideal berdasarkan rumusan Pancasila. Akan tetapi dalam perkembangan zaman berikutnya, khususnya pada periode Zaman mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), pemerintahan Republik Indonesia Serikat (1949-1950), Demokrasi Liberal (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), pemerintahan Orde Baru (1966-1998), dan post-reformasi (1999-hingga kini), Pancasila cenderung ditempatkan alat kenegaraan dalam menghadapi berbagai permasalahan dan jiwa zaman dan bukan sebagai landasan negara dan bangsa. Akibat dari kecenderungan tersebut adalah arah dinamika Pancasila selalu bergerak dari negara kepada masyarakat-bangsa. Dalam praktiknya, Pancasila dilejitkan sebagai ideologi oleh Soekarno (1945-1965). Sebagai ideologi, Soekarno menempatkan Pancasila sebagai representasi idealisme dan realitas empiris yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sementara itu masa kekuasaan Orde Baru (1966-1998), Pancasila cenderung digunakan sebagai bagian dari alat penjaga kestabilan politik dan sosial dalam masyarakat. Soeharto menjalankan program indoktrinasi Pancasila yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Fitch dan Webb, 1989).

Kebanyakan peneliti dan analis politik memfokuskan berbagai penyimpangan dan penafsiran ulang ini dalam dimensi politik. Ketika Pancasila disahkan dalam Sidang PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi bagian dari integral negara Indonesia. Namun, sayangnya diskrepansi Pancasila dan *living values* ini berakibat fatal yaitu terserapnya kekuatan Pancasila ke dalam institusi negara. Ketika negara kuat Pancasila menjadi kuat, tetapi ketika negara lemah maka Pancasila turut menjadi lemah. Hal inilah yang kita temui ketika keruntuhan Orde Baru yang menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila karena keterikatannya dengan rezim Orde Baru (Hadiz, 2004).

Pada titik ini tantangan terbesar dalam konsep Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nusantara adalah tergerusnya dan tidak terurusnya tradisi kesenian dalam masyarakat. Penggerusan ini terjadi karena tantangan globalisasi dan warisan politik kebudayaan yang cenderung ditujukan melegitimasi kekuasaan politik. Dengan demikian, yang dapat dilakukan sebagai bagian penting dari upaya memperkuat Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia adalah penguatan kesenian, tradisi melalui penciptaan enabling environment dan dukungan terhadap komunitas-komunitas budaya, agama, sosial yang aktif berperan dalam upaya penguatan nilai Pancasila. Dengan penguatan tersebut, masyarakat memiliki kekuatan untuk turut serta berpartisipasi dalam pengautan Pancasila dan pada titik tertentu menjadi bagian dari koreksi dalam pelaksanaan Pancasila di tingkat elit.

SIMPULAN

Tulisan ini menunjukkan keberadaan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat nusantara. Secara historis keberadaannya dapat ditelusuri dalam momentum sidang BPUPK 1 Juni 1945, khususnya dalam pidato Soekarno. Dalam pidatonya, Soekarno menekankan pentingnya perumusan *Weltanschauung* yang nanti dirumuskan menjadi Pancasila sebagai dasar dari negara merdeka. Dalam pencarian *Weltanschauung*, aspek relasi dan dialektika antara manusia dan tempatnya menjadi penting. Sumber dari Pancasila adalah nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dalam momentum sidang BPUPK 1945, Pancasila memiliki tiga wujud yang saling berkelindan yaitu: (1) Pancasila sebagai landasan filosofi, bintang penunjuk, dan dasar negara, (2) Pancasila sebagai *common denominator*, dan (3) Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia menyediakan ruang bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam penguatan Pancasila dari laku kehidupan arif yang mereka lakukan sehari-hari yang pada tingkatan tertentu dapat mengoreksi penyelewangan Pancasila. Berdasarkan potensi ini, peneliti merekomendasikan penelitian lanjutan untuk mengkaji bagaimana eksistensi dan perubahan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia saat ini sebagai landasan dari penguatan Pancasila. Di samping itu, diperlukan penguatan terhadap pelaku dan komunitas seni dan budaya sekaligus tokoh agama dan masyarakat

sebagai bagian dari agen penguatan Pancasila melalui aktivitas produktif yang dilakukan mereka. Pada cakupan yang lebih luas, pemerintah harus menyediakan lingkungan yang memadai untuk persemaian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dengan menyediakan ruang publik dan ruang akademis untuk mendiskusikan dan belajar mengenai Pancasila sebagai nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sinergi tersebut, harapan untuk mencapai masyarakat Pancasila dapat terwujud secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S. (2016). *Falsafah Kebudayaan Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Asshiddiqie, J. (2011). Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila dan Kaedah-Kaedah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. *Kongres Pancasila III*, 33-47.
- Fitch, R. M., & Webb, S. A. (1989). Cultural Immersion in Indonesia through Pancasila: State Ideology. *The Journal of Educational Thought (JET)/Revue de la Pensée Educative*, 44-51.
- Iskandar, P. (2016). The Pancasila Delusion. *Journal of Contemporary Asia*, 46(4), 723-735.
- Liddle, R. W. (1982). The politics of ekonomi pancasila: Some reflections on a recent debate. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 18(1), 96-101.
- McCawley, P. (1982). The economics of ekonomi pancasila. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 18(1), 102-109.
- Morfit, M. (1981). Pancasila: The Indonesian state ideology according to the new order government. *Asian Survey*, 21(8), 838-851.
- Notonagoro (1988) Pancasila: Dasar Filsafah Negara (Kumpulan Uraian Pokok-pokok Persoalan tentang Pancasila. Jakarta: Bina Aksara
- Poespowardojo, S. (1989). *Filsafat Pancasila: sebuah pendekatan sosio-budaya*. Gramedia.
- Purdy, S. S. (1982). The civil religion thesis as it applies to a pluralistic society: Pancasila democracy in Indonesia (1945-1965). *Journal of International Affairs*, 307-316.
- Song, S. W. (2008). *Back to basics in Indonesia? Reassessing the Pancasila and Pancasila State and society, 1945–2007*. Ohio University.
- Suwarno, P. J. (1993). *Pancasila budaya bangsa Indonesia: penelitian Pancasila dengan pendekatan, historis, filosofis & sosio-yuridis kenegaraan*. Kanisius.
- Hadiz, V. R. (2004). The failure of state ideology in Indonesia: the rise and demise of: Pancasila. In *Communitarian Politics in Asia* (pp. 162-175). Routledge.
- Ward, K. (2010). Soeharto's Javanese Pancasila. *Soeharto's new order and its legacy: Essays in honour of Harold Crouch*, 27-38.

- Wahyudi, A. (2006). Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politis?. *Jurnal Filsafat*, 16(1), 94-115.
- Wahyudi, A. (2012). *Hukum tata negara Indonesia dalam perspektif Pancasila pasca reformasi*. Pustaka Pelajar.
- Widiuseno, I. (2014). Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara. *HUMANIKA*, 20(2), 62-66.